

Mari, Ramai-Ramai Habiskan Anggaran...



Jalan rusak terdapat di sejumlah tempat di jalur lintas barat Sumatera. Jalan di Jorong Kampung Alang, Nagari Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat ini adalah salah satu contohnya. Kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati karena lubang besar menghadang di tengah jalan aspal. Jalur ini menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Sumatera Utara.

KOMPAS/AGNES RITA SULISTYAWATY
Soal Hutang APBN, Pemerintah Harus Transparan/KompasTV

Kompas, Jumat, 12 Desember 2008.

Oleh Suhartono

Pada jajaran birokrasi pemerintahan, sudah lama ada kebiasaan di akhir tahun anggaran suka membuat proyek baru dan sifatnya dadakan. Proyek baru tersebut sering dituding sebagai cara ramai-ramai birokrasi menghabiskan anggaran departemen yang masih tersisa, supaya seluruh anggarannya bisa terserap dan tahun depan tetap bisa mengajukan yang lebih besar lagi.

Di beberapa departemen seperti Departemen Pertanian dilaporkan juga baru melakukan sejumlah pelatihan bagi pegawainya, yang lokasinya di luar kota. Selain itu, ada juga departemen dan instansi Pemerintah yang tiba-tiba merenovasi bangunan kantornya.

Sejumlah wartawan tiba-tiba di akhir tahun ini juga banyak menerima undangan diskusi di kawasan Puncak, Bogor. "Kemarin saya ikut diskusi di Bulog, minggu besok lagi ikut diskusi di Kementerian Negara Koperasi dan UKM," ungkap seorang wartawan radio.

Di Istana Negara dan Istana Merdeka, penggantian karpet merahnya oleh pengelola Rumah Tangga Istana baru-baru ini, sempat pula dituduh cara-cara menghabiskan anggaran di akhir tahun. Nilai proyek penggantian karpet itu disebut-sebut miliaran rupiah.

Di Istana Wakil Presiden, juga ada tuduhan sejenis. Peralnya, tiba-tiba semua pohon dan tanaman besar yang terletak di halaman Istana Wapres, ditemeli papan nama yang bertuliskan nama jenis pohon berikut nama latinnya. Padahal, sebelumnya pohon dan tanaman itu tak bernama. Seorang staf di Istana Wapres sempat berkomentar, proyek kecil-kecilan itu untuk menghabiskan anggaran Sekretariat Wapres yang masih tersisa. "Kalau mau menata, seharusnya dari dulu-dulu. Kenapa baru sekarang," ujarnya.

Benarkah demikian? Kepala Rumah Tangga Kepresidenan Achmad Rusdi membantah. Penggantian karpet lama dengan yang baru itu sudah kita rencanakan hampir setahun lalu. Karena itu menyangkut rancangan desain dan tender pengadaan barangnya. Jadi, bukan dadakan dan untuk menghabiskan anggaran akhir tahun, tandasnya, seraya

menyebut karpet merah itu belum diganti sejak masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Presiden *kan*, harus memberi contoh. Jadi, tidak mungkin Istana ikut-ikutan menghabiskan anggaran. Sejak dua tahun lalu, anggaran Kepresidenan selalu tersisa sampai Rp 50-60 miliar," tambahnya.

Bantahan yang sama juga disampaikan Deputy Seswapres Bidang Administrasi Henry Sulistyono. Pembuatan papan nama pohon itu sudah direncanakan lama, namun realisasinya baru sekarang. "Jadi, tidak benar mau sekadar menghabiskan anggaran," ujar Henry.

Diakui Henry, pembuatan sekitar 100 papan nama itu hanya proyek kecil, yang nilainya di bawah Rp 50 juta sehingga tidak menggunakan *tender*. "Pak Wapres sudah mewanti-wanti dan sering mengontrol, sehingga kita tidak mungkin kita main-main anggaran, sekadar untuk itu," lanjutnya.

Namun, di mata Inspektur Jenderal (Irjen) Departemen Keuangan Hekinus Manao, kecenderungan sejumlah birokrasi pemerintah menghabiskan dana di akhir tahun anggaran sudah lama menjadi keprihatinannya. "Memang, tidak semua melakukan. Akan tetapi, ini kebiasaan yang harus diubah," ujar Hekinus.

Ia pun bertekad tahun depan akan mewaspadai agar tidak terjadi pencairan anggaran dan permainan sulap yang bisa merugikan negara. Kecenderungan ini sudah lama terjadi. "Tim saya akan mewaspadai. Seharusnya, pencairan anggaran itu berlangsung tiap waktu secara berkesinambungan, dan tidak menumpuk di akhir tahun," tambahnya.

Menurut dia, jika anggaran departemen setiap tahunnya tersisa, dana itu tidak boleh dialihkan ke tahun depan. Konsekuensinya, tahun anggaran berikutnya, DPR dan Pemerintah bisa saja hanya menyetujui besaran dana yang jumlahnya lebih kecil dari sebelumnya, mengingat anggaran sebelumnya tak terpakai seluruhnya. Jangan-jangan karena itu, para birokrasi mengakali anggaran?

PERTANYAAN:

1. Dengan merujuk pada kutipan laporan media di atas, buatlah analisis mengenai penyebab pokok pemborosan anggaran dalam proses kebijakan publik di Indonesia. Apakah sebab-sebab pemborosan anggaran itu dapat dijelaskan dari besarnya **belanja tidak langsung** jika dibanding **belanja langsung** pemerintah? Jelaskan.
2. Buatlah rekomendasi untuk memperbaiki proses kebijakan yang selama ini berlaku, terutama agar belanja pemerintah dapat lebih difokuskan pada belanja modal (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dll) yang langsung bermanfaat bagi rakyat banyak. Tunjukkan dasar analisis bagi rekomendasi anda.